

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**NINDA FATMAWATI**

**1410222036**

Pembimbing I : Prof. Rudi Febriamansyah, MSc., Ph.D.

Pembimbing II : Rafnel Azhari, SP, MSi

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

# ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan; (2) menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengambilan responden yaitu dengan *purposive sampling*. Data analisa pada tujuan pertama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pada tujuan kedua menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dinilai dengan cara membandingkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Data didapatkan dari wawancara terstruktur dengan responden penelitian. Berdasarkan data tersebut akan didapatkan persentase akuntabilitas setiap aspek. Pengelolaan keuangan nagari dikatakan akuntabel apabila  $\geq 50\%$ , dan tidak akuntabel apabila  $< 50\%$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan secara keseluruhan telah sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan desa yang terdapat di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akuntabilitas pada aspek perencanaan adalah 48%, akuntabilitas pada aspek pelaksanaan adalah 87%, akuntabilitas pada aspek penatausahaan adalah 33%, akuntabilitas pada aspek pelaporan adalah 59%, dan akuntabilitas pada aspek pertanggungjawaban adalah 68%. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan ini adalah sebesar 87%. Hal ini berarti bahwa terdapat 13% atau sebanyak 3 nagari yang pengelolaan keuangan nagarinya tidak akuntabel. Nagari yang tidak akuntabel tersebut dikarenakan masalah internal nagari, yakni seringnya pertukaran (*reshuffle*) dan perangkat nagari yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) nya. Berdasarkan penelitian tersebut dilihat bahwa pengelolaan keuangan nagari akan dapat berjalan dengan baik apabila didasarkan pada peraturan yang berlaku baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta selalu tingkatkan kemampuan sumber daya perangkat nagari.

Kata Kunci: *akuntabilitas, keuangan nagari, Permendagri No. 113 Tahun 2014*

# AN ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT IN KOTO XI TARUSAN DISTRICT PESISIR SELATAN REGENCY

## ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the accountability of financial management in Koto XI Tarusan subdistrict. Structured interviews were conducted with respondents selected by purposive sampling. Data analysis for the first objective used descriptive qualitative methods and for the second objective used quantitative descriptive methods. Accountability of village financial management was assessed by comparing the suitability of the implementation of village financial management in Koto XI Tarusan subdistrict with Permendagri No. 113 of 2014. Based on these data a percentage of accountability was obtained for each aspect. Village financial management is said to be accountable if  $\geq 50\%$ , and not accountable if  $< 50\%$ . The results showed that the village financial management in Koto XI Tarusan subdistrict as a whole was in accordance with the village financial management procedures contained in Permendagri No. 113 of 2014. Accountability in the planning aspect was 48%, accountability in the implementation aspect was 87%, accountability in the administration aspect was 33%, accountability in the reporting aspect was 59%, and accountability in the accountability aspect was 68%. While the accountability of village financial management in this sub-district was 87%. This means that there are 13% or as many as 3 villages whose financial management is not accountable. The village which was not accountable was due to the internal problems of the Nagari, namely the frequent reshuffle and the Nagari lacking the understanding of its main tasks and functions. Based on this research, it can be seen that the management of village finances will be able to run well if it is based on the regulations that have been established by the central government and regional governments.

**Keywords:** *accountability, village financial, Permendagri No. 113 Year 2014*